

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan suatu negara atau wilayah. Tujuan utama dari pemerintah adalah untuk menjaga keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari monarki, di mana kekuasaan terpusat pada seorang raja atau ratu, hingga republik, di mana kekuasaan terletak pada rakyat atau wakil yang dipilih.

Di Indonesia, sistem pemerintahan berbentuk republik dengan ciri khas presidensial yang sistem pemerintahannya terbagi menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dipimpin oleh presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang bertanggung jawab atas urusan nasional. Sedangkan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dipimpin oleh gubernur atau bupati/wali kota yang masing-masing pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur urusannya sendiri.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Beberapa peran penting pemerintah daerah antara lain yaitu pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, pengaturan pembangunan, pengaturan dan pengawasan, pelaksana kebijakan pusat, dan pemberdaya masyarakat. Peran pemerintah daerah yang sangat penting tersebut dapat menunjukkan bahwa tata kelola

pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional secara berkala.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan daerahnya dengan baik guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berdampak positif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran pemerintah daerah dalam hal ini sangat krusial.

Pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang buruk atau tidak transparan dapat menghambat atau bahkan menghalangi publikasi laporan keuangan, karena potensi adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pengelolaan keuangan yang tidak ingin diungkapkan.

Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan yang baik juga dapat menciptakan kepercayaan dari masyarakat dan pihak terkait lainnya, sehingga meningkatkan kemungkinan untuk menerbitkan laporan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang baik dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, khususnya Pulau Jawa belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. Sebagian pemerintah daerah tersebut belum memaksimalkan penggunaan *website* mereka sebagai sarana untuk menyebarkan informasi keuangan yang mereka kelola. Informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Berdasarkan analisis *website* resmi pemerintah kabupaten/kota yang berada di Pulau Jawa, hanya 47,89% di antaranya yang melakukan publikasi laporan keuangan melalui *website* resmi mereka. Angka tersebut belum mencapai separuh dari total jumlah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Beberapa *website* pemerintah daerah masih belum menyediakan laporan keuangan mereka secara lengkap. Bahkan, terdapat *website* yang tidak memberikan akses masyarakat ke laporan keuangan dan hanya berfungsi sebagai media publikasi program-program pemerintah.

Tabel 1.1
Persentase Publikasi LKPD di Pulau Jawa

Pemerintah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Publikasi LKPD di Website		Jumlah Kab/Kota yang Tidak Melakukan Publikasi LKPD di Website		Jumlah Kab/Kota	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Jawa Timur	13	34,21%	25	65,78%	38	100%
Jawa Barat	7	25,92%	20	74,7%	27	100%
Jawa Tengah	25	71,42%	10	28,57%	35	100%
Banten	7	87,5%	1	12,5%	8	100%
DIY	5	100%	0	0%	5	100%
DKI Jakarta	0	0%	6	100%	6	100%
Total	57	47,89%	62	52,10%	119	100%

(Sumber: *Website pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2022*)

Selama pandemi Covid-19, pemeriksaan laporan audit oleh auditor dimungkinkan tidak dilakukan secara langsung. Hal tersebut memperhatikan kondisi dari daerah yang sedang diaudit. Sebagai alternatif, auditor dapat melakukan audit jarak jauh dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam pedoman audit. Meskipun demikian, risiko kecurangan menjadi lebih sulit terdeteksi selama pandemi sehingga mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses audit.

Berdasarkan analisis *website* resmi Badan Pemeriksa Keuangan, sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Jawa telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama pandemi. Beberapa kabupaten di Jawa Barat seperti Indramayu dan Bandung Barat mengalami kenaikan dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ke Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di Jawa Timur, Kabupaten Jember juga berhasil meningkatkan opini dari Tidak Wajar (TW) ke Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kenaikan opini audit menunjukkan peningkatan kualitas laporan keuangan yang disajikan. Akan tetapi, perolehan opini audit tersebut belum tentu mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangannya di *website* resmi.

Selain itu, tingkat realisasi belanja daerah di Pulau Jawa berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh prioritas pengeluaran yang diatur dalam anggaran daerah, yang dapat dipengaruhi oleh kebutuhan infrastruktur, program sosial, atau pengembangan ekonomi lokal. Berdasarkan analisis *website* resmi Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, realisasi belanja daerah di Pulau Jawa dikatakan cukup baik. Meskipun di Provinsi Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta realisasi belanja daerah masih terdapat selisih lebih yang berarti kinerja keuangan belanja tidak baik.

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022

Pemerintah Provinsi	Anggaran	Realisasi	Persentase
Jawa Timur	Rp 132.921,12 M	Rp 132.262,51 M	99,50%
Jawa Barat	Rp 125.580,82 M	Rp 128.860,25 M	102,61%
Jawa Tengah	Rp 108.399,56 M	Rp 105.931,69 M	97,72%
Banten	Rp 38.013,59 M	Rp 37.758,58 M	99,33%
DIY	Rp 16.093,25 M	Rp 16.127,34 M	100,21%
DKI Jakarta	Rp 76.840,31 M	Rp 64.865,12 M	84,42%

(Sumber: *Website Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2022*)

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi keuangan mereka kepada para pemangku kepentingan. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah belanja daerah. Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar sekaligus menjadi kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.² Realisasi belanja daerah dianggap sebagai indikator oleh pemerintah daerah bahwa pelayanan kepada masyarakat telah diberikan secara optimal.

² Mohammad Khusaini, Khusnul Ashar, Ghazali Maski, *Manajemen Belanja Daerah*, (Universitas Brawijaya Press: Malang, 2021), hlm. 10

Terdapat hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara belanja daerah dan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Pada dasarnya, pengeluaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan sumber dana yang digunakan juga berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan transparansinya sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait penggunaan dana untuk pengeluaran daerah.³

Beberapa penelitian mengenai belanja daerah lainnya menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara belanja daerah dengan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu penelitian yang mendukung temuan ini mengungkapkan bahwa semakin besar belanja daerah, tidak berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah karena belanja daerah merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Belanja daerah merupakan bagian dari anggaran yang bertujuan untuk diimplementasikan dan dievaluasi, sehingga tidak berpengaruh terhadap keputusan apakah laporan keuangan akan dipublikasikan atau tidak.⁴

Faktor selanjutnya adalah rasio pembiayaan utang yang merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan

³ Triana Saraswati, Laeli Budiarti, Yudha Aryo Sudibyo, “*Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Mempengaruhinya*”, Jurnal Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 3 No. 1, Juli 2019: 85 – 101

⁴ Eva Anggra Yunita, “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Publikasi Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemerintah Daerah Se-Jawa Tengah”, Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial: Dialektika, Vol. 6 No. 1, Februari 2021: 44 – 54

keuangan daerah tersebut. Rasio pembiayaan utang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar ketergantungan suatu daerah pada kreditur dalam membiayai asetnya.⁵ Semakin tinggi rasio pembiayaan utang, semakin besar pula ketergantungan pemerintah daerah pada utang untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Hal ini bisa menjadi tanda peringatan karena terlalu banyak utang dapat mengganggu stabilitas keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah biasanya berusaha untuk menjaga rasio ini dalam batas yang sehat.

Terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa rasio pembiayaan utang berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pembiayaan terhadap pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan dan program yang terintegrasi untuk masyarakat di masa depan. Selain itu, hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sebagai kreditur akan memberikan dampak pada sejauh mana informasi keuangan akan diungkapkan.⁶

Penelitian lainnya mengungkapkan hal sebaliknya bahwa rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh signifikan terhadap publikasi informasi keuangan pemerintah daerah. Alasan perbedaan hasil penelitian

⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Rajawali Press: Depok, 2019), hlm. 153

⁶ Christina, “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Pembiayaan Utang, dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 2, September 2016: 1 – 15

tersebut diduga karena menggunakan metode yang berbeda yaitu logaritma natural perbandingan total kewajiban dengan total aset.⁷

Faktor selanjutnya yaitu opini audit. Merumuskan opini audit adalah bagian akhir dari sebuah penugasan audit yang mana opini tersebut berupa pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan berdasarkan bukti audit yang dikumpulkannya.⁸ Terdapat beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan daerah. Kondisi ini didukung oleh peningkatan jumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mendapatkan opini audit dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diterimanya opini audit WTP menunjukkan bahwa terdapat sedikit temuan yang mengindikasikan bahwa pelaporan dan pelaksanaan keuangan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk memberikan informasi secara transparan tentang pelaksanaan pemerintahannya yang telah sesuai dengan peraturan.⁹

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian lainnya yang mengungkapkan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan daerah. Hal ini berarti

⁷ Indra Agung Wilopo, “Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui *Website*”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol. 7 No. 1, Juni 2017: 61 – 78

⁸ Arum Ardianingsih, *Audit Laporan Keuangan*, (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2018), hlm. 155

⁹ Pancawati Hardiningsih, Ceacilia Srimindarti, Afifatul Jannah, Maria Yosaphat D. H., “*Digitalisasi Publikasi Laporan Keuangan Daerah*”, Jurnal Keuangan dan Bisnis, Vol. 19 No. 1, Maret 2021: 132 – 146

pemerintah daerah yang mendapat opini audit positif menunjukkan kualitas pelaporan dan pengelolaan keuangan yang baik, serta cenderung transparan dalam menyampaikan informasi.¹⁰

Faktor selanjutnya yaitu tingkat waktu penyelesaian audit (*audit delay*). *Audit delay* merupakan rentang waktu yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan laporan audit terhadap kinerja laporan keuangan. Rentang waktu ini dapat dilihat dari perbedaan antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit dalam laporan keuangan yang telah diaudit.¹¹ Ketepatan waktu dalam menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit sangatlah penting, terutama bagi sektor publik yang mengandalkan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Namun, auditor memerlukan waktu yang memadai untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kompeten dan mendukung opininya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah secara jelas memisahkan jangka waktu penyampaian laporan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada BPK dan jangka waktu pemeriksaan oleh BPK. Berdasarkan peraturan tersebut, laporan keuangan harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada BPK

¹⁰ Fikrinah Naopal, Sri Rahayu, Siska Priyandani Y., “Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Assets*, Vol. 7 No. 1, Juni 2017: 56 – 68

¹¹ Rizal Mawardi dan Laela Lanjarsih, *Faktor-Faktor Determinan Audit Delay*, (Uwais Inspirasi Indonesia: Ponorogo, 2019), hlm. 26

dalam waktu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan BPK memiliki waktu 2 bulan untuk memeriksa laporan tersebut sejak diterima.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka ada keinginan lebih dari penulis untuk meneliti pengaruh opini audit, belanja daerah, dan rasio pembiayaan utang terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa dengan mengambil judul **“Pengaruh Opini Audit, Belanja Daerah, dan Rasio Pembiayaan Utang Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Tingkat Waktu Penyelesaian Audit Sebagai Variabel Intervening”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan pemilihan topik permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat publikasi laporan keuangan pemerintah daerah perlu dimaksimalkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
2. Opini audit yang bersifat negatif dapat membuat pemerintah daerah kurang percaya diri untuk mempublikasikan laporan keuangannya.
3. Tingginya belanja daerah dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam menyusun dan memeriksa laporan keuangan.

¹² Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam <https://peraturan.bpk.go.id>

4. Pemerintah daerah yang kurang optimal dalam mengelola utang sehingga dapat memunculkan risiko keuangan yang tinggi, dapat memunculkan keputusan untuk tidak mempublikasikan laporan keuangannya.
5. Kurangnya ketepatan waktu dalam menyelesaikan audit laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Ketepatan waktu publikasi laporan keuangan yang kurang maksimal.
7. Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak publikasi laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah rasio pembiayaan utang berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap tingkat waktu penyelesaian audit?
5. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap tingkat waktu penyelesaian audit?
6. Apakah rasio pembiayaan utang berpengaruh terhadap tingkat waktu penyelesaian audit?

7. Apakah tingkat waktu penyelesaian audit berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah?
8. Apakah opini audit berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui tingkat waktu penyelesaian audit?
9. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui tingkat waktu penyelesaian audit?
10. Apakah rasio pembiayaan utang berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui tingkat waktu penyelesaian audit?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menguji pengaruh variabel opini audit, belanja daerah, dan rasio pembiayaan utang terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan tingkat waktu penyelesaian audit sebagai variabel intervening dengan uji Statistika. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah opini audit berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji apakah belanja daerah berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji apakah rasio pembiayaan utang berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menguji apakah opini audit berpengaruh terhadap tingkat waktu penyelesaian audit.

5. Untuk menguji apakah belanja daerah berpengaruh terhadap tingkat waktu penyelesaian audit.
6. Untuk menguji apakah rasio pembiayaan utang berpengaruh terhadap tingkat waktu penyelesaian audit.
7. Untuk menguji apakah tingkat waktu penyelesaian audit berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah.
8. Untuk menguji apakah opini audit berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui tingkat waktu penyelesaian audit.
9. Untuk menguji apakah belanja daerah berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui tingkat waktu penyelesaian audit.
10. Untuk menguji apakah rasio pembiayaan utang berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui tingkat waktu penyelesaian audit.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi pemerintah, pelaku ekonomi, maupun peneliti selanjutnya. Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai literatur yang bermanfaat secara teori terkait dengan publikasi laporan keuangan, opini audit, belanja daerah,

rasio pembiayaan utang, dan tingkat penyelesaian audit baik bagi mahasiswa, pelaku ekonomi, maupun pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti maupun bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan tambahan bagi perpustakaan kampus, terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana informasi yang bisa digunakan pihak pemerintah daerah untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu, sehingga laporan keuangan dapat mudah diakses oleh masyarakat umum melalui berbagai media, termasuk *website* resmi pemerintah daerah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran maupun referensi dalam penulisan penelitian selanjutnya sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak bagi pembaca.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian diperlukan agar pembahasan dalam penelitian tidak terlalu luas atau menyimpang dan lebih terarah sehingga dapat fokus pada tujuan penelitian. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup difokuskan pada tingkat publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang dibatasi menggunakan variabel independen opini audit, belanja daerah, dan rasio pembiayaan utang serta menggunakan variabel intervening yaitu tingkat waktu penyelesaian audit.
2. Keterbatasan pada penelitian ini yaitu periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada tahun 2022 dengan mengambil populasi dari seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Pulau Jawa.

G. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini diperlukan penegasan istilah dari judul yang diangkat agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual
 - a. Opini audit merupakan kesimpulan yang diperoleh auditor berdasarkan pada pemeriksaan audit yang dilakukan dan diberikan

dengan mempertimbangkan standar profesional akuntan yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).¹³

- b. Belanja daerah merupakan tanggung jawab yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih dalam satu periode anggaran. Pengeluaran ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.¹⁴
- c. Rasio pembiayaan utang atau *leverage* merupakan suatu indikator keuangan yang mengukur kemampuan suatu entitas dalam memenuhi tanggung jawab keuangan jangka panjangnya, termasuk pembayaran bunga atas utang, pelunasan utang pokok, dan kewajiban tetap lainnya.¹⁵
- d. Tingkat waktu penyelesaian audit atau *audit delay* merupakan lamanya waktu proses audit yang dihitung mulai dari penutupan tahun buku hingga selesainya laporan audit oleh auditor.¹⁶

2. Definisi Operasional

Secara operasional, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh opini audit, belanja daerah, dan rasio pembiayaan utang terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di Pulau Jawa di mana variabel tersebut akan dipengaruhi/mempengaruhi tingkat

¹³ Sri Wiranti Setiyanti, “Jenis – Jenis Pendapat Auditor (Opini Auditor)”, Jurnal STIE Semarang, Vol. 4 No. 20, Juni 2012: 19 – 28

¹⁴ Wa Ariadi, *Manajemen Belanja Daerah dalam Konsep dan Analisis*, (Deepublish: Sleman, 2021), hlm. 3

¹⁵ Ni Putu Ari Aryawati, dkk., *Manajemen Keuangan*, (Tahta Media Group: Klaten, 2022), hlm. 76

¹⁶ Dina Puspita Sari, Erly Mulyani, “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 – 2017)”, Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), Vol. 1 No. 2, Mei 2019: 646 – 665

waktu penyelesaian audit (*audit delay*). Dengan adanya publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui *website*, diharapkan dapat menjangkau masyarakat guna membantu tercapainya prinsip transparansi dan akuntabilitas di pemerintah daerah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika penulisan dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan sistematis dari isi karya ilmiah tersebut. Sistematika penulisan ini dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pusaka yang berisi teori-teori besar, teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menyajikan tentang pendekatan dan jenis pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menyajikan uraian tentang paparan hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis sesuai dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan dan menjawab masalah penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi, yang mana pada kesimpulan, uraian dibuat berdasarkan analisis data. Selanjutnya, pada bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran.